



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

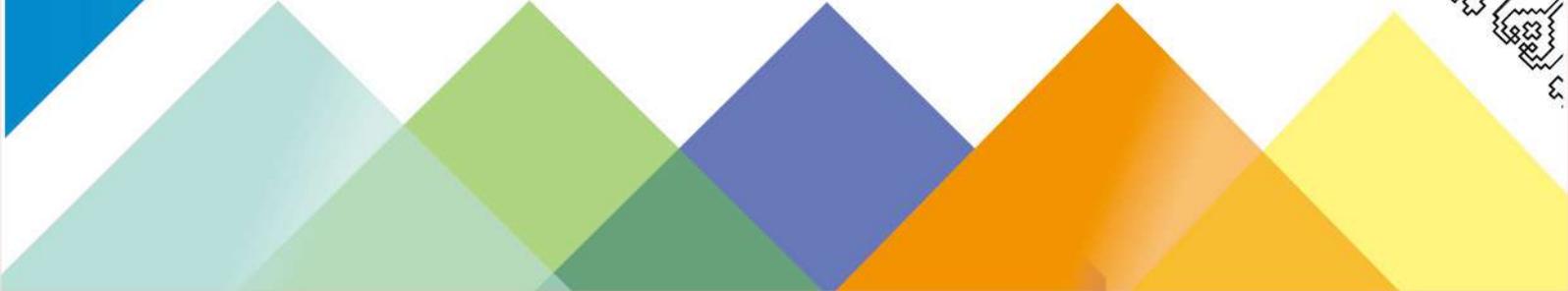
# LAPORAN KEUANGAN

STASIUN KIPM GORONTALO

Untuk Periode 31 Desember 2023 (Audited)



2023



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun KIPM Gorontalo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan Laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun KIPM Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/05/2016 serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang Transparan, Akurat dan Akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna Laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun KIPM Gorontalo.

Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Gorontalo, 05 Januari 2024  
Kepala,

Abdul Kadir, S.Pi.M.Si  
NIP 197303021999031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	v
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	7
A. Penjelasan Umum .....	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun KIPM Gorontalo.....	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	16
A.3. Basis Akuntansi .....	16
A.4. Dasar Pengukuran.....	17
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	17
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	26
B.1. Pendapatan.....	27
B.2. Belanja.....	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	34
C.1. Aset Lancar .....	34
C.2. Aset Tetap.....	38
C.3. Piutang Jangka Panjang.....	42
C.4. Aset Lainnya.....	43
C.5. Kewajiban .....	44
C.6. Ekuitas .....	46
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	44
D.1. Pendapatan Operasional.....	47
D.2. Beban Pegawai.....	47

D.3. Beban Persediaan .....	48
D.4. Beban Barang dan Jasa .....	49
D.5. Beban Pemeliharaan .....	50
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	50
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	51
D.8. Beban Bantuan Sosial .....	51
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	52
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	52
D.11. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional .....	53
D.12. Pos Luar Biasa .....	54
E. Penjelasan atas Pos-pos Perubahan Ekuitas.....	55
E.1. Ekuitas Awal .....	55
E.2. Surplus (Defisit) LO .....	55
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas .....	55
E.4. Transaksi Antar Entitas.....	56
E.5. Ekuitas Akhir .....	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	58
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	58
F.2. Pengungkapan Lain-lain .....	58



### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Stasiun KIPM Gorontalo yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 komprehensif sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Gorontalo, 05 Januari 2024  
Kepala,

*Abdul Kadir*  
Abdul Kadir, S.Pi.M.Si  
NIP 197303021999031003

Laporan Keuangan Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara s.d Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp16.832.968 atau mencapai 92,36 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp18.225.000 sedangkan Realisasi Belanja s.d Desember 2023 adalah sebesar Rp6.104.825.289 atau mencapai 99,29 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.148.510.000 Realisasi Belanja terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp3.472.525.052, Realisasi Belanja Barang sebesar Rp2.448.995.737, dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp183.304.500.

### **2. NERACA**

Neraca Tahun 2023 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp10.660.088.663 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp148.156.532; Aset Tetap (neto) sebesar Rp10.511.932.131 Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp18.193.502 dan Rp10.641.895.161.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional Tahun 2023 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.570.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6.386.245.380 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai (Rp6.370.675.380). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.080.000, dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp6.369.595.380).

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp10.923.497.305, dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp6.369.595.380) kemudian ditambah dengan koreksi lain-lain senilai Rp915 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.087.992.321 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp10.641.895.161.

#### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN  
REALISASI ANGGARAN

STASIUN KIPM GORONTALO  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% Thn Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan PNBP	B.1	18.225.000	16.832.968	92,36	24.960.018
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>18.225.000</b>	<b>16.832.968</b>	<b>92,36</b>	<b>24.960.018</b>
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	3.479.974.000	3.472.525.052	99,79	3.332.417.386
Belanja Barang	B.4	2.485.036.000	2.448.995.737	98,55	1.876.639.907
Belanja Modal	B.5	183.500.000	183.304.500	99,89	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	-
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>6.148.510.000</b>	<b>6.104.825.289</b>	<b>99,29</b>	<b>5.209.057.293</b>

II. NERACA

STASIUN KIPM GORONTALO  
NERACA  
UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2023	TA 2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.4	542.797	182.968
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.5	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.6	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.7	(2.714)	(915)
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.8	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	540.083	182.053
	C.1.11	147.616.449	77.728.486
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>148.156.532</b>	<b>77.910.539</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	5.028.779.785	5.028.779.785
Gedung dan Bangunan	C.2.2	5.755.700.620	5.572.396.120
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.3	4.964.613.010	4.964.613.010
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	254.281.160	254.281.160
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.5	45.170.000	45.170.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	-	-
	C.2.7	(5.536.612.444)	(5.005.475.208)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>10.511.932.131</b>	<b>10.859.764.867</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.3		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.1	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.2	-	-
	C.3.3	-	-
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.4		
Aset Lain-Lain	C.4.1	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2	-	-
	C.4.3	-	-
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>10.660.088.663</b>	<b>10.937.675.406</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.2	18.193.502	14.178.101
Beban Yang Masih Harus Dibayar	C.5.3	-	-
	C.5.4	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>18.193.502</b>	<b>14.178.101</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>18.193.502</b>	<b>14.178.101</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.6	10.641.895.161	10.923.497.305
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>10.641.895.161</b>	<b>10.923.497.305</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>10.660.088.663</b>	<b>10.937.675.406</b>

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KIPM GORONTALO  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	15.570.000	24.960.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>15.570.000</b>	<b>24.960.000</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	3.471.982.255	3.330.529.386
Beban Persediaan	D.3	185.063.342	150.872.600
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.292.535.057	1.174.156.038
Beban Pemeliharaan	D.5	318.924.945	288.581.340
Beban Perjalanan Dinas	D.6	586.599.831	290.304.487
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	531.137.236	552.578.884
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih	D.10	2.714	915
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>6.386.245.380</b>	<b>5.787.023.650</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(6.370.675.380)</b>	<b>(5.762.063.650)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan pelepasan aset non lancar		-	-
Beban pelepasan aset non lancar		-	-
Surplus/defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya			
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		1.080.000	18
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>1.080.000</b>	<b>18</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(6.369.595.380)</b>	<b>(5.762.063.632)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
D.12			
Pos Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
Pos Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(6.369.595.380)</b>	<b>(5.762.063.632)</b>

**IV. LAPORAN  
PERUBAHAN EKUITAS**

STASIUN KIPM GORONTALO  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
EKUITAS AWAL	E.1	10.923.497.305	11.501.463.662
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-6.369.595.380	-5.762.063.632
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	915	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	-	-
Koreksi Lain-lain	E.3.5	915	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	6.087.992.321	5.184.097.275
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS		(281.602.144)	(577.966.357)
EKUITAS AKHIR	E.5	10.641.895.161	10.923.497.305

## A. PENJELASAN UMUM

### *Rencana Strategis*

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun KIPM Gorontalo

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Tahapan dalam perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan, yakni:

- (1) penyusunan rencana,
- (2) penetapan rencana,
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu ***“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
- (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing,
- (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
- (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,

- (6) P enegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa,
- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarustamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk :

- (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan
- (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan difokuskan

untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan. Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/ pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk

perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan *Codex Alimentarius.*, atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor. Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat *mandatory*, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia. Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM dapat menyesuaikan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan system perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM. Faktor-faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2020 - 2024.

Visi Presiden Republik Indonesia yakni “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diamanatkan, BKIPM melaksanakan 3 dari 4 misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu :

1. **“Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”**, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
2. **“Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”**, melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
3. **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”**, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan dari hulu sampai hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

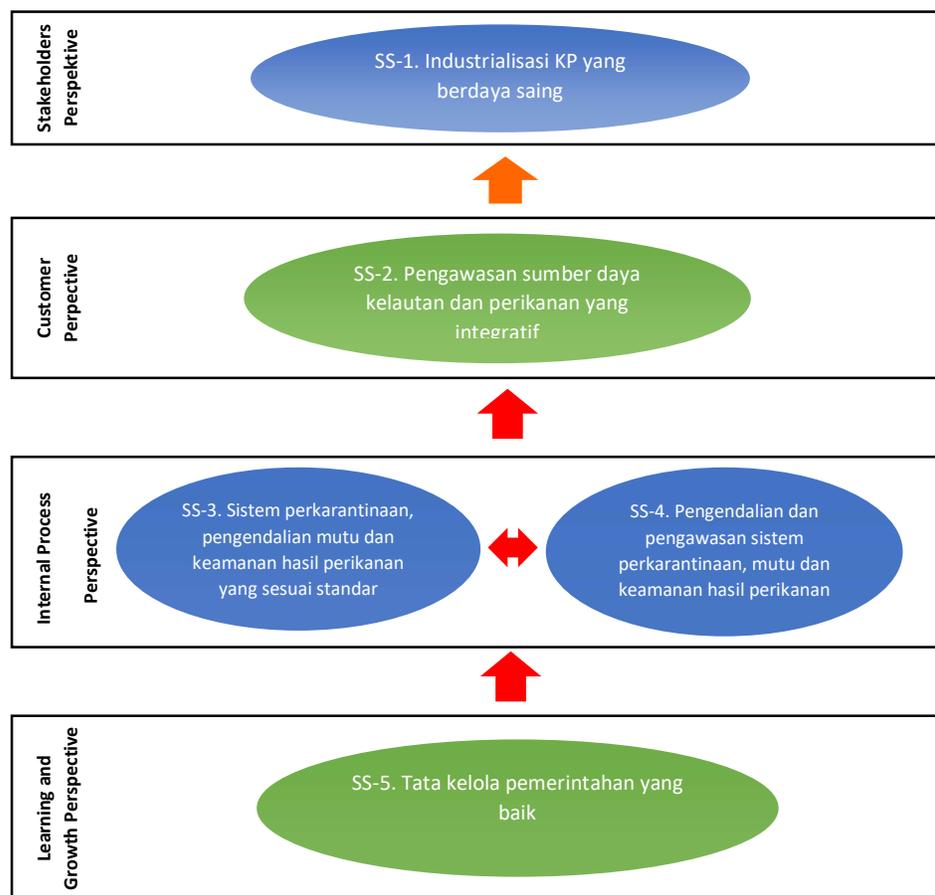
BKIPM bertanggung jawab pada pencapaian tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BKIPM.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Stasiun KIPM Gorontalo sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2020-2024, terdiri dari :

1. Industrialisasi KP yang berdaya saing;
2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;
3. Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar;
4. Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif;
5. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, Stasiun KIPM Gorontalo menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, dengan Peta Strategi sebagai berikut :



Gambar 1. Peta Strategis Stasiun KIPM Gorontalo

Arah kebijakan dan strategi BKIPM Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan 6 tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional;
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional;
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina ikan dan perikanan;

4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI;
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi public;
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian;
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data;
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBPKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBPKIPM berbasis digital.

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

### *Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun KIPM Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## A.3. Basis Akuntansi

### *Basis Akuntansi*

Stasiun KIPM Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.4. Dasar Pengukuran

##### *Dasar Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

##### *Kebijakan Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Gorontalo adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Beban*

**(3) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(4) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset  
Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*      **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 Tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR)

atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Masa Manfaat Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

*Aset  
Lainnya*

**d. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*      **(5) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*      **(6) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun KIPM Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sampai dengan Revisi ke 06 dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

### Rekapitulasi Revisi DIPA TA 2023

No	Uraian	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
1	Data Awal	30 Nopember 2022	-
2	Revisi Ke-1	02 Februari 2023	Halaman III DIPA
3	Revisi Ke-2	13 April 2023	Halaman III DIPA
4	Revisi Ke-3	17 Juli 2023	Halaman III DIPA
5	Revisi Ke-4	19 Oktober 2023	Buka blokir
6	Revisi Ke-5	08 November 2023	Halaman III DIPA
7	Revisi Ke-6	27 Desember 2023	Pemuktahiran POK

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan PNB	18.225.000	18.225.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>18.225.000</b>	<b>18.225.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	3.501.629.000	3.479.974.000
Belanja Barang	2.485.036.000	2.485.036.000
Belanja Modal	183.500.000	183.500.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.170.165.000</b>	<b>6.148.510.000</b>

B.1. Pendapatan

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp16.832.968*

Realisasi Pendapatan TA 2023 adalah sebesar Rp16.832.968 atau mencapai 92,36 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp18.225.000. Berikut Pendapatan Stasiun KIPM Gorontalo:

Uraian	TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
<b>Pendapatan Jasa Karantina Perikanan</b>			
<b>Standardisasi</b>	18.225.000	16.832.968	92,36
<b>Pendapatan PNBP Lainnya</b>			
Pendapatan dari penjualan tanah , gedung dan bangunan		-	-
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin		-	-
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah		-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		-	-
<b>Total Pendapatan PNBP Lainnya</b>		-	
<b>Jumlah</b>	<b>18.225.000</b>	<b>16.832.968</b>	<b>92,36</b>

Pendapatan PNBP TA 2023 mengalami penurunan sebesar 33 persen dibandingkan TA 2022. Adapun hal hal yang menyebabkan tidak tercapainya target PNBP adalah sebagai berikut :

- Komoditi produk perikanan berkurang sehingga mempengaruhi jumlah pengiriman produk ikan keluar Gorontalo dan penerapan PP Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Di bawah ini adalah tabel perbandingan pencapaian realisasi PNBP TA 2023 dan 2022

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022*

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Naik/Turun (%)
Pendapatan PNBP	16.832.968,	24.960.018,	(33)
<b>Jumlah</b>	<b>16.832.968</b>	<b>24.960.018</b>	<b>(33)</b>

Berikut ini adalah pendapatan penerimaan negara bukan pajak Tahun 2023 pada Stasiun KIPM Gorontalo yaitu:

- Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya sebesar Rp15.150.000 pendapatan ini merupakan pendapatan fungsional dari Stasiun KIPM Gorontalo;
- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp420.000 pendapatan ini merupakan pendapatan fungsional dari Stasiun KIPM Gorontalo;
- Penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.262.968. pendapatan ini merupakan :
  - Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2022 sebesar Rp182.968 yang disetor melalui potongan tukin Januari dengan SPM Nomor : 00008A Tanggal 8 Februari 2023.
  - Pengembalian selisih Tunjangan Fungsional dan struktural Tahun 2021 sebesar Rp1.080.000 yang disetor melalui Potongan SPM Nomor : 00054A Tanggal 31 Maret 2023.

## B.2. Belanja

*Realisasi Belanja Negara (Netto) Rp6.104.825.289*

Realisasi Belanja TA 2023 adalah sebesar Rp6.104.825.289 atau 99,29 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6.148.510.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut :

### *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023*

URAIAN	TA 2023				
	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Persentase Anggaran
Belanja Pegawai	3.479.974.000	3.472.604.263	79.211	3.472.525.052	99,79
Belanja Barang	2.485.036.000	2.454.866.407	5.870.670	2.448.995.737	98,55
Belanja Modal	183.500.000	183.304.500	-	183.304.500	99,89
<b>Jumlah</b>	<b>6.148.510.000</b>	<b>6.110.775.170</b>	<b>5.949.881</b>	<b>6.104.825.289</b>	<b>99,29</b>

Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 17,20 persen dibandingkan dengan TA 2022 namun dilihat dari segi besaran realisasi anggaran pada Tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2022 hal ini disebabkan dari penetapan pagu anggaran Tahun 2023 lebih besar dibandingkan Tahun 2022 .

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022*

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Naik/Turun (%)
Belanja Pegawai	3.472.525.052	3.332.417.386	4,20
Belanja Barang	2.448.995.737	1.876.639.907	30,50
Belanja Modal	183.304.500	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.104.825.289</b>	<b>5.209.057.293</b>	<b>17,20</b>

B.3. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai  
Rp3.472.525.052*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.472.525.052 dan Rp3.332.417.386 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,34 persen dari TA 2022.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.238.213.300	1.209.883.500	2,34%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.030	21.661	-16,76%
Belanja Tunj. Suami Istri PNS	92.887.310,	88.540.150,	4,91%
Belanja Tunj. Anak PNS	28.621.114,	26.781.344,	6,87%
Belanja Tunj. Struktural PNS	12.600.000,	16.920.000,	-25,53%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	95.880.000,	95.750.000,	0,14%
Belanja Tunj. PPh PNS	671.500,	542.900,	23,69%
Belanja Tunj. Beras PNS	80.965.560,	79.227.480,	2,19%
Belanja Uang Makan PNS	80.965.560,	229.629.000,	-64,74%
Belanja Tunjangan Umum PNS	12.740.000,	13.160.000,	-3,19%
Belanja Uang Lembur	76.460.000,	3.704.000,	1964,25%
Belanja Tunj Khusus atau	1.623.920.449,	1.572.577.391,	3,26%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.343.942.823</b>	<b>3.336.737.426</b>	<b>0,22%</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	79.211	4.320.040	-98,17%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.343.863.612</b>	<b>3.332.417.386</b>	<b>0,34%</b>

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya kenaikan 0,34 persen pada belanja pegawai Stasiun KIPM Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Kenaikan pangkat
- Kenaikan grade pada tunjangan kinerja
- Kenaikan Gaji Berkala
- Penambahan anak
- Anggaran lembur

**B.4. Belanja Barang**

*Belanja Barang  
Rp2.448.995.737*

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.448.995.737 dan Rp1.876.639.907. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 30, 50 persen dari TA 2022.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	889.828.773	743.887.907	19,62
Belanja Barang Non Operasional	92.224.700	49.587.650	85,98
Belanja Barang Persediaan	302.620.585	191.769.000	57,80
Belanja Jasa	310.045.683	380.606.763	(18,54)
Belanja Pemeliharaan	271.426.835	220.484.100	23,10
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	588.719.831	290.304.487	102,79
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.454.866.407</b>	<b>1.876.639.907</b>	<b>30,81</b>
Pengembalian Belanja	5.870.670	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.448.995.737</b>	<b>1.876.639.907</b>	<b>30,50</b>

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa pada Tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi belanja barang sebesar 30,50 persen dibandingkan Tahun 2022. Kenaikan pada Anggaran belanja barang operasional, non operasional, barang persediaan, pemeliharaan dan perjalanan dinas sedangkan penurunan ada pada pos belanja jasa.

**B.5. Belanja Modal**

*Belanja Modal  
Rp183.304.500*

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp183.304.500, dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.304.500	-	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>183.304.500</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>183.304.500</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

#### B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal  
Tanah  
Rp.0*

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp183.304.500*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp183.304.500, dan Rp0.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Alat Rumah Tangga	43.500.000	-	#DIV/0!
Komputer Unit	124.375.500	-	#DIV/0!
Peralatan Komputer	15.429.000	-	#DIV/0!
Alat Pengolahan	0	-	#DIV/0!
Alat Laboratorium	0	-	#DIV/0!
Komputer Unit	0	-	#DIV/0!
Peralatan Komputer	0	-	#DIV/0!
Alat SAR	0	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>183.304.500</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>183.304.500</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

Penjelasan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 adalah sebagai berikut : Meja Kerja Kayu 1 unit, Kursi Besi/Metal 7 unit, Meja Rapat 1 unit, Lemari Es 1 unit, A.C. Split 2 unit, Dispenser 1 unit, P.C Unit 3 unit, Lap Top 4 unit, Printer (Peralatan Personal Komputer) 4 unit.

#### B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp.0,*

Tidak terdapat Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0.

#### B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp.0*

Tidak terdapat Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

#### B.5.5 Belanja Modal Lainnya

*Belanja Modal  
Lainnya  
Rp0*

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### B.6. Belanja Bantuan Sosial

*Belanja Bantuan  
Sosial  
Rp0*

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 tidak mengalami penurunan/kenaikan sebesar 00,00 % persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja Bantuan Sosial selama TA 2023 dan 2022

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. Aset

#### C.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0*

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab dari bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP dan TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. berdasarkan LPJ bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022*

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Uang tunai di brangkas	-	-
Uang muka voucher	-	-
Uang di bank	-	-
Kwitansi UP	-	-
selisih	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

#### C.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

#### C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas.

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022*

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak  
Rp542.797*

Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari piutang penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan. Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp542.797 dan Rp182.968.

C.1.5 Bagian Lancar TP/TGR

*Bagian Lancar  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tun-  
tutan Ganti Rugi  
(TP/TGR)  
Rp0*

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

#### C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar  
Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan (TPA) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

#### C.1.7 Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang JK Pendek

*Penyisihan Piutang  
tidak tertagih-  
Piutang JK Pendek  
(Rp2.714)*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(2.714) dan Rp(915). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang JK Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang JK Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang, masing-masing debitur.

##### Rincian Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	542.797	0.5%	2.714
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	<b>542.797</b>	<b>0%</b>	<b>2.714</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih</b>	<b>542.797</b>	<b>0.5%</b>	<b>2.714</b>

#### C.1.8 Beban Dibayar Dimuka

*Beban Dibayar  
Dimuka  
Rp0*

Tidak terdapat saldo Belanja dibayar di muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

#### C.1.9 Pendapatan yang Masih harus Diterima

*Pendapatan yang  
Masih harus  
Diterima  
Rp0*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan Hak Pemerintah atas layanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Stasiun KIPM Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

#### C.1.10 Piutang Bukan Pajak (Netto)

*Piutang Bukan Pajak  
(Netto)  
Rp540.083*

Piutang Bukan Pajak (Netto) merupakan piutang yang berasal dari piutang penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan. Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp540.083 dan Rp182.053.

#### C.1.11 Persediaan

*Persediaan  
Rp147.616.449*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp147.616.449,- dan Rp77.728.486,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022*

Jenis	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi (117111)	116.571.184	35.180.846
Bahan untuk Pemeliharaan (117113)	120.000	-
Bahan Baku (117131)	-	3.935.000
Suku Cadang (117114)	30.925.265	38.612.640
<b>Jumlah</b>	<b>147.616.449</b>	<b>77.728.486</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap*  
*Rp10.511.932.131*

Saldo Aset Tetap Stasiun KIPM Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.511.932.131 dan Rp10.859.764.867. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Stasiun KIPM Gorontalo berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

*Tanah*  
*Rp5.028.779.785*

Nilai aset tanah yang dimiliki Stasiun KIPM Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah seluas 2.601 m2 sebesar Rp5.028.779.785,- dan Rp5.028.779.785. Tidak ada penambahan nilai tanah pada Tahun 2022 ke Tahun 2023.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>5.028.779.785</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penyitaan Pengadilan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>5.028.779.785</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>5.028.779.785</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Luas	Lokasi	Nilai
400 m2	Jl. Mayor Dullah Kota Gorontalo	796.535.000
1603 m2	Jl. Raden Saleh No.20 Kota Gorontalo	3.719.905.000
598 m2	Jl. Trans Sulawesi Kabupaten Gorontalo	512339785
<b>Jumlah</b>		<b>5.028.779.785</b>

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin  
Rp5.755.700.620*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp5.755.700.620,- dan Rp5.572.396.120,- Terdapat kenaikan penambahan nilai pada Peralatan dan Mesin dari Tahun 2022 ke Tahun 2023.

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>5.572.396.120</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	183.304.500
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian Aset	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>5.755.700.620</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	4.916.357.916
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>839.342.704</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- ✚ Pembelian Meja Kerja Kayu sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp8.500.000,-
- ✚ Pembelian Kursi Besi/Metal sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp11.500.000,-
- ✚ Pembelian Meja Rapat sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp4.500.000,-
- ✚ Pembelian Lemari Es sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp3.500.000,-
- ✚ Pembelian A.C. Split sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp12.000.000,-
- ✚ Pembelian Dispenser sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp3.500.000,-

- ✚ Pembelian P.C Unit sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp44.955.000,-
- ✚ Pembelian Lap Top sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp79.420.500,-
- ✚ Pembelian Printer sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp15.429.000,-

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp4.964.613.010*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp4.964.613.010,- dan Rp4.964.613.010,- tidak terdapat penambahan nilai pada Gedung dan bangunan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023.

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>4.964.613.010</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penyitaan Pengadilan	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>4.964.613.010</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	554.937.364
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>4.409.675.646</b>

### C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp 254.281.160*

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp254.281.160,- dan Rp254.281.160,- Tidak terdapat nilai tambah dan pengurangan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023.

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>254.281.160</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian Aset	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>254.281.160</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	65.317.164
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>188.963.996</b>

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya  
Rp45.170.000,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp45.170.000,- dan Rp45.170.000,- Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023 dan 2022.

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>45.170.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian Aset	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>45.170.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>45.170.000</b>

#### C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp 0*

Tidak terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
(Rp 5.536.612.444)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp5.536.612.444) dan (Rp5.005.475.208). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.755.700.620	4.916.357.916	839.342.704
2	Gedung dan Bangunan	4.964.613.010	554.937.364	4.409.675.646
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	254.281.160	65.317.164	188.963.996
4	Aset Tetap Lainnya	45.170.000	0	45.170.000
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>11.019.764.790</b>	<b>5.536.612.444</b>	<b>5.483.152.346</b>

### C.3. Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0*

Tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang Stasiun KIPM Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

#### C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

##### Ganti Rugi (TP/TGR)

*Piutang Tagihan  
Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0*

Tidak terdapat Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Stasiun KIPM Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

#### C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

#### C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0*

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Stasiun KIPM Gorontalo per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

#### C.4. Aset Lainnya

*Aset Lainnya  
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Aset Lainnya Stasiun KIPM Gorontalo per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

#### C.4.1. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud  
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

#### C.4.2. Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain  
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

#### C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

#### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

##### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN  
Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja.

#### C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp18.193.502*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp18.193.502 dan Rp14.178.101 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Stasiun KIPM Gorontalo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023*

Uraian	Utang kepada pihak ke tiga	
	2023	2022
Pembayaran Listrik	15.856.086	12.277.430
Pembayaran Air	1.449.025	1.012.280
Pembayaran Telepon	888.391	888.391
<b>Jumlah</b>	<b>18.193.502</b>	<b>14.178.101</b>

#### C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan  
Diterima Dimuka  
Rp0*

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang / jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

#### C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang Masih  
Harus Dibayar  
Rp0*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada Pihak Ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

#### C.6. Ekuitas

*Ekuitas*  
*Rp10.641.895.161*

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.641.895.161 dan Rp10.923.497.305 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan  
PNBP  
Rp15.570.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp15.570.000 dan Rp 24.960.000. Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 60,31 persen. PNBP Stasiun KIPM Gorontalo tersebut terdiri dari :

#### *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya (425289)	15.150.000	24.960.000	-64,75
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan (425332)	420.000	-	100,00
<b>Total</b>	<b>15.570.000</b>	<b>24.960.000</b>	<b>-60,31</b>

### D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
Rp3.471.982.255*

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.471.982.255 dan Rp3.330.529.386 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berikut rincian beban pegawai Stasiun KIPM Gorontalo :

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.238.213.300	1.208.232.700	2,42
Beban Pembulatan Gaji PNS	17.740	20.285	-14,35
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	92.887.310	88.496.070	4,73
Beban Tunj. Anak PNS	28.621.114	26.772.528	6,46
Beban Tunj. Struktural PNS	12.600.000	12.600.000	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	95.880.000	95.750.000	0,14
Beban Tunj. PPh PNS	671.500	542.900	19,15
Beban Tunj. Beras PNS	80.965.560	79.227.480	2,15
Beban Uang Makan PNS	209.627.000	229.629.000	-9,54
Beban Tunjangan Umum PNS	12.740.000	13.160.000	-3,30
Beban Uang Lembur	76.460.000	3.704.000	95,16
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.623.298.731	1.572.394.423	3,14
<b>Jumlah</b>	<b>3.471.982.255</b>	<b>3.330.529.386</b>	<b>4,07</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2022 beban pegawai Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,07 persen.

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan  
Rp185.063.342*

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp185.063.342 dan Rp150.872.600. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Berikut rincian beban persediaan Stasiun KIPM Gorontalo :

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	180.978.342	143.625.040	20,64
Beban Persediaan Bahan Baku	4.085.000	7.247.560	-77,42
Beban Persediaan lainnya	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>185.063.342</b>	<b>150.872.600</b>	<b>18,48</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2022 beban persediaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 18,48 persen.

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang  
dan Jasa  
Rp1.292.535.057*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.292.535.057 dan Rp1.174.156.038. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Berikut rincian beban barang dan jasa Stasiun KIPM Gorontalo :

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	616.927.183	445.476.807	27,79
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	123.994.000	127.680.000	-2,97
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusa	1.937.800	1.758.000	9,28
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	106.422.000	122.556.000	-15,16
Beban Barang Operasional Lainnya	37.507.790	46.417.100	-23,75
Beban Bahan	82.025.200	29.587.650	63,93
Beban Honor Output Kegiatan	8.160.000	-	100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	20.000.000	-1233,33
Beban Langganan Listrik	148.629.857	128.706.434	13,40
Beban Langganan Telepon	12.843.982	14.596.730	-13,65
Beban Langganan Air	12.840.245	11.368.785	11,46
Beban Jasa Lainnya	139.747.000	0	100,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	97.987.532	#DIV/0!
Beban Sewa	-	35.000.000	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	-	92.171.000	#DIV/0!
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	850.000	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>1.292.535.057</b>	<b>1.174.156.038</b>	<b>9,16</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2022 beban barang dan jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,16 persen.

#### D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp318.924.945*

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp318.924.945 dan Rp288.581.340. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Berikut rincian beban pemeliharaan Stasiun KIPM Gorontalo :

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	122.728.830	89.400.000	27,16
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148.526.835	131.084.100	11,74
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	32.006.000	26.539.000	17,08
Beban persediaan suku cadang	15.663.280	41.558.240	-165,32
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>318.924.945</b>	<b>288.581.340</b>	<b>9,51</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2022 beban pemeliharaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,51 persen.

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp586.599.831*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp586.599.831 dan Rp290.304.487. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan pegawai teknis untuk Tahun 2023.

Berikut rincian beban perjalanan dinas Stasiun KIPM Gorontalo :

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	167.830.000	77.910.000	53,58
Beban Perjalanan Dinas Dalam	69.150.000	36.300.000	47,51
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.500.000	12.000.000	35,14
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	331.119.831	164.094.487	50,44
<b>Jumlah</b>	<b>586.599.831</b>	<b>290.304.487</b>	<b>50,51</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2022 beban perjalanan dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 50,51 persen.

#### D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0*

Tidak terdapat saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

#### D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan  
Sosial  
Rp0*

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

#### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp531.137.236*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp531.137.236 dan Rp552.578.884. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Berikut rincian beban penyusutan dan amortisasi Stasiun KIPM Gorontalo :

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	415.290.047	435.599.361	-4,89
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	107.094.755	107.094.755	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.132.333	2.264.667	-100,00
Beban Penyusutan Irigasi	4.793.483	4.793.483	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	2.826.618	2.826.618	0,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>531.137.236</b>	<b>552.578.884</b>	<b>-4,04</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2022 beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 105,07 persen.

#### D.10. Beban Penyisihan piutang tak tertagih

*Beban  
Penyisihan  
piutang tak  
tertagih  
Rp2.714*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,714 dan Rp915.

Piutang tak tertagih Stasiun KIPM Gorontalo

URAIAN BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Pajak	-	-	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	2.714	915	66,29
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>2.714</b>	<b>915</b>	<b>66,29</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2022 beban Penyisihan piutang tak tertagih Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 66,29 persen.

D.11. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

*Surplus/Defisit  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp1.080.000*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.080.000 dan Rp18.

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
<b>Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	1.080.000	18	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	#DIV/0!
<b>Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			#DIV/0!
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Rusak/Usang	-	-	#DIV/0!
<b>Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>1.080.000</b>	<b>18</b>	<b>100,00</b>

#### D.12. Pos Luar Biasa

---

*Pos Luar  
Biasa  
Rp0*

Tidak terdapat saldo pendapatan atau beban Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan Tahun 2022. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal*  
*Rp10.923.497.305*

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp10.923.497.305 dan Rp11,501,463,662.

### E.2. Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO*  
*(Rp6.369.595.380)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp6.369.595.380) dan (Rp5.762.063.632) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan Non operasional, dan Pos luar biasa.

Rincian Defisit LO Stasiun KIPM Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (penurunan) %
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	(6.370.675.380)	(5.762.063.650)	10,562
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	1.080.000	18	5.999.900,000
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	-	-	-
<b>Defisit LO</b>	<b>(6.369.595.380)</b>	<b>(5.762.063.632)</b>	<b>10,544</b>

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian  
Nilai Aset*  
*Rp0,-*

Tidak terdapat Saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp0,-*

Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

### E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap  
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

### E.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset  
Tetap Non  
Revaluasi  
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Koreksi Nilai Aset tetap Non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

### E.3.5. Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-Lain  
Rp915*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp915 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara namun merupakan koreksi atas penyisihan piutang tak tertagih.

### E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp6.087.992.321*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.087.992.321 dan Rp5.184.097.275.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	TA 2023	TA 2022
Diterima dari Entitas Lain	(16.832.968)	(24.960.018)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.104.825.289	5.209.057.293
Transfer Masuk	-	-
Transfer Keluar	-	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.087.992.321</b>	<b>5.184.097.275</b>

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023 DDEL sebesar Rp16.832.968 sedangkan DKEL sebesar Rp(6.104.825.289).

#### E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir*  
*Rp10.641.895.161*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.641.895.161 dan Rp10.923.497.305 Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, surplus/defisit lo, penyesuaian nilai tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan transaksi antar entitas.

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

---

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

---

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk diungkapkan pada Laporan Keuangan Tahun 2023

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

---

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

---

Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2023

#### F.2.2. Temuan dan Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal KKP

---

Temuan oleh Inspektorat Jenderal KKP yang tertuang dalam LHP Pertanggungjawaban Keuangan Negara No.T.257/ITJ.4/HP.550/XI/2023 Tanggal 2 November 2023 yaitu :

1. Terdapatnya tukin dan honor pengelola keuangan yang tidak sesuai ketentuan. Nilai temuan sebesar Rp.78.921
2. Terdapatnya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan. Nilai temuan sebesar Rp2.120.000
3. Terdapatnya belanja pemeliharaan kantor yang tidak sesuai ketentuan. Nilai temuan sebesar Rp171.170
4. Terdapatnya belanja barang yang tidak sesuai ketentuan kekurangan seragam dinas pegawai 28 stel.
5. Terdapatnya pertanggungjawaban keuangan kegiatan pekan pelayanan yang tidak sesuai ketentuan. Nilai temuan sebesar Rp539.500
6. Terdapat belanja daya tahan tubuh yang tidak sesuai ketentuan. Nilai temuan sebesar Rp3.040.000.
7. Terdapat administrasi Perjalanan dinas yang belum memadai.

memperhatikan temuan Inspektorat Jenderal KKP, maka Stasiun KIPM Gorontalo telah menanggapi dan menindaklanjuti temuan tersebut dengan menagih kekurangan dan menyetor kembali kelebihan pembayaran ke kas negara sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor :

1. B.713/SKIPM.GTO/HP.550/XI/2023 Tanggal 6 November 2023
2. B.714/SKIPM.GTO/HP.550/XI/2023 Tanggal 6 November 2023
3. B.715/SKIPM.GTO/HP.550/XI/2023 Tanggal 6 November 2023
4. B.716/SKIPM.GTO/HP.550/XI/2023 Tanggal 6 November 2023
5. B.717/SKIPM.GTO/HP.550/XI/2023 Tanggal 6 November 2023
6. B.718/SKIPM.GTO/HP.550/XI/2023 Tanggal 6 November 2023
7. B.719/SKIPM.GTO/HP.550/XI/2023 Tanggal 6 November 2023

#### F.2.3. Catatan Penting Lainnya

---

Tidak terdapat catatan penting lainnya Tahun 2023

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)  
TAHUNAN TA 2023**

Kode dan Nama UAKPA : (649678) Stasiun KIPM Gorontalo  
 Kode dan Nama UAPPAW : (3100) Gorontalo  
 Kode dan Nama Eselon 1 : (13) BPPMHKP  
 Kode dan Nama K/L : (032) Kementerian Kelautan dan Perikanan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>				
	<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI</b>				
	<b>Kesesuaian Saldo</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>				
	<b>Persamaan Dasar Akuntansi</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
<b>PENGECEKAN PADA MONSAKTI</b>				
	<b>To Do List</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak

12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	<b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	<b>Rekon Internal</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	<b>Daftar MONSAKTI</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>				
	<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	N/A	N/A	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak

5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	<b>Jika Bukan Satker BLU</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	<b>Terkait Satker BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	N/A	N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	N/A	N/A	Tidak
	<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial	N/A	N/A	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI	N/A	N/A	Tidak
	<b>Hibah Langsung</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	N/A	N/A	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	N/A	N/A	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A	N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	N/A	N/A	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya
	<b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			

3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>				
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada <b>Neraca Percobaan Kas?</b>		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A	N/A	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	N/A	N/A	Ya
<b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>				
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
<b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>				
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LO</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak

	<b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Pengungkapan Koreksi Lain-lain pencatatan senilai Rp915 yaitu untuk menghindari saldo tidak normal atas beban penyisihan piutang bersaldo di kredit dengan melakukan jurnal balik Beban Penyisihan Piutang Lainnya akun 594212(D) ke Koreksi Lainnya akun 391119 (K) dengan dokumen sumber Memo Penyesuaian			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	N/A	N/A	Ya
<b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya
<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>				
	<b>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	N/A	N/A	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	N/A	N/A	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	N/A	N/A	Ya
	<b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
	<b>Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	N/A	N/A	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	N/A	N/A	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	N/A	N/A	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	N/A	N/A	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak

5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan AkruaI	√		Ya/Tidak

**TELAAH LK BLU**

<b>LPSAL BLU</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?	N/A	N/A	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	N/A	N/A	Ya
<b>LAK BLU</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya

**LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN**

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk*

 <p>Mengetahui          Pejabat Penyusun LKKL,            Kadir Kadir, S.Pi, M.Si          NIP 197303021999031003</p>	<p>Gorontalo, 05 Januari 2024          Penelaah,            (Kartono Karim)          NIP 198011282009011003</p>
---	--



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 649678  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,148,510,000	6,148,510,000	0
2	Belanja	6,110,775,170	6,110,775,170	0
3	Pengembalian Belanja	-5,949,881	-5,949,881	0
4	Estimasi Pendapatan	18,225,000	18,225,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	16,832,968	16,832,968	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24*

